

Peta Pemanfaatan Areal Sawit Untuk Pemberdayaan Mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik di Aceh Timur

Fadli Jalil

Dosen Agribisnis pada Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh. Aceh, Indonesia

Abstract: *This study examines the economic empowerment policies through the commodity of palm oil. This research aims is to investigate the use of the palm plantation forum for the empowerment of former GAM combatants and conflict-affected communities. This study was conducted in East Aceh District, Aceh Province, Indonesia. This study uses qualitative methode. The results showed that the government provided palm plantation in East Aceh district for the empowerment of former GAM combatants and victims of the conflict have embraced 23 of 24 districts. The Location of palm plantation given to former GAM combatants and conflict-affected communities can not be separated each other, even the proposed assistance through the group. Its members consist of three components of the society, ie ordinary people, former GAM combatants and conflict-affected communities. But, in terms of the people of Aceh, actually all the people consider themselves as victims of the bloody conflict under the Soeharto's New Order.*
Kata Kunci: *Aceh; konflik; Kebijakan; Pemberdayaan; ekonomi dan Sawit.*

Pendahuluan

Ekonomi Indonesia, khususnya Aceh hingga kini masih bergantung pada sektor pertanian (perkebunan). Sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor ini, walaupun tidak dapat dipastikan jumlahnya secara pasti. Komoditi sawit saat ini menjadi komoditi terpopuler di Aceh, “tanaman emas” pasca kasusepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki. Komoditi kelapa sawit juga digunakan untuk meningkatkan perekonomian mantan GAM dan masyarakat korban konflik.

Komoditi kelapa sawit memiliki berbagai macam kegunaan, baik untuk industri pangan maupun non pangan. Oleh karena itu peluang peningkatan ekonomi masyarakat melalui komoditi kelapa sawit masih cukup terbuka bagi Aceh. Provinsi Aceh memiliki iklim dan topografi yang sangat “ideal” bagi penggarapan kelapa sawit (Firman, dkk., 2007:5). Selain itu, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh setelah minyak dan gas.

Luasan areal perkebunan kelapa sawit di Aceh terus berkembang dan tidak hanya merupakan monopoli perkebunan besar negara atau perkebunan besar swasta, tetapi juga terdapat perkebunan rakyat yang sudah berkembang dengan pesat, baik melalui bantuan pemerintah maupun swadaya masyarakat sendiri. Untuk itu, kontribusi kelapa sawit untuk meningkatkan perekonomian lokal tidak perlu diragukan lagi. Namun pada sisi lain berkembangnya perkebunan kelapa sawit juga telah berdampak buruk terhadap pengembangan dan pembangunan sosial, lingkungan dan ekonomi. Aceh menduduki peringkat daerah termiskin kelima di Indonesia dan termiskin se Sumatera. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Aceh, Syech Suhaimi pada September (2012) jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 18,58% masih berada diatas angka kemiskinan nasional yang hanya 11,66% (Bisnis Aceh, 11 Februari 2013).

Fenomena seperti ini juga berlaku di Aceh Timur. Kelapa sawit menjadi komoditi

unggulan utamanya di samping komoditi yang lain seperti Kakao, Karet, Kopi dan Kelapa. Namun tingkat kemiskinan mencapai 19,46% pada tahun 2012 (Badan Pusat Statistik Aceh Timur, 2013). Di samping itu banjir sudah menjadi langganan tahunan, bahkan meluas ke jalan negara yang mengganggu transportasi Aceh – Medan, satu minggu sampai dua minggu lamanya. Akibatnya bahan sembako di Aceh langka dan harganya meningkat.

Landasan Konseptual

a. Konsep Kebijakan

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan – pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik yaitu rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara (Suharto. 2011)

Sementara Winarno (2007) mengatakan kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Berdasarkan beberapa definisi di atas kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian ide atau gagasan yang tersusun yang dijadikan sebagai pedoman acuan strategi dan kerangka tindakan yang ditetapkan sebagai roadmap pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan.

b. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat daya kelompok lemah dalam masyarakat. Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan untuk mewujudkan perubahan sosial yaitu membuat masyarakat atau kelompok serta individu menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial (Soeharto. 2008).

Pemberdayaan merupakan satu strategi untuk melaksanakan pembangunan yang berdasarkan azas kerakyatan. Dimana segala upaya diarahkan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberdayaan diaktualisasikan melalui partisipasi masyarakat dengan pendampingan yang dilakukakan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada kelompok masyarakat yang terorganisir (Nugroho. 2001).

Menurut Basyid, pemberdayaan masyarakat tidak saja dilakukan melalui pendekatan teknis tetapi juga pendekatan sosial budaya yang dapat merangsang perubahan sikap, perilaku dan pola kerja. Untuk mendukung proses perubahan tersebut maka peranan pemerintah dapat dilakukan antara lain melalui; (1) penyediaan sarana prasarana fisik, yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian dan lingkungan usaha. (2) Fasilitasi percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. (3) Fasilitasi pembentukan iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas dan kegiatan ekonomi masyarakat serta investasi. (4) Penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat petani.

Menurut Burhan (2011) pemberdayaan petani dilakukan dengan cara memposisikan para petani sebagai mitra atau subjek dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pemberdayaan. Untuk itu, pendekatan dapat dilakukan secara partisipatif dan dialogis memadukan pendekatan dari bawah dan dari atas dalam merumuskan program, pendekatan dengan mempertimbangkan kondisi sosio kultural masyarakat, dan menggunakan agen pembaharu atau tenaga pendamping.

c. Kelapa Sawit

Kelapa sawit awalnya berasal dari Afrika, kemudian banyak berkembang di Amerika dan Asia Tenggara (Adams, 2011). Secara usia kelapa sawit dikategorikan sebagai tanaman tahunan. Ia merupakan komoditas andalan untuk ekspor non migas. Indonesia merupakan negara pengekspor kelapa sawit terbesar, kemudian disusul oleh Malaysia dan Papua New Guinea (Portal Nasional Republik Indonesia, 2010).

Pemanfaatan kelapa sawit lebih populer digunakan sebagai minyak nabati yang dihasilkan dari daging buah dan perasan biji. Kelapa sawit memiliki nilai konsumtif dan nilai ekonomis. Minyak kelapa sawit adalah minyak nabati yang paling banyak diperdagangkan di dunia, produksinya menempati tingkat pertama minyak nabati yang mencapai sekitar 45 juta ton (Adams, 2011), dan menempati urutan kedua dari minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat setelah minyak kedelai.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Suyatno (2005) metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang dikaji. Sejalan dengan itu, Kirk dan Miller (1986) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Selanjutnya menurut Denzin dan Lincoln (1987) dalam Moleong (2007) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan pelbagai metode yang ada. Dengan demikian penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan menyeluruh. Dalam hal ini penelitian kualitatif berupaya menyajikan dunia sosial dari segi konsep, perilaku, perspektif dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah mantan GAM dan masyarakat korban konflik serta pihak pemerintah atau dinas terkait di Kabupaten Aceh Timur. Dengan maksud mendapatkan gambaran secara nyata dan terevaluasi mengenai strategi dan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan evaluatif sifatnya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui; (1) wawancara mendalam, dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan yang ditentukan secara purposive (Bupati dan Kepala dinas terkait, mantan GAM dan masyarakat korban konflik di Aceh Timur) guna mendapatkan informasi secara lengkap, mendalam, dan komprehensif; (2) observasi non partisipan, dan (3) studi dokumentasi seperti bulletin, laporan tahunan, jurnal, majalah, koran, foto, dan catatan/laporan/arsip.

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan model interaktif Miles dan

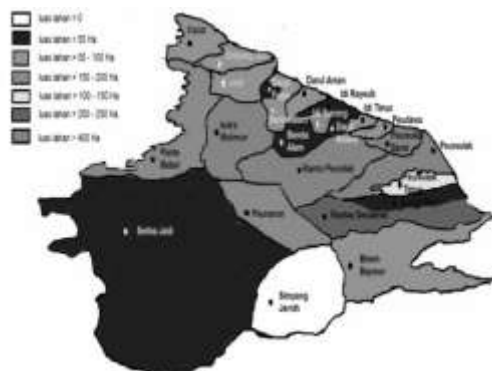
Haberman. Analisis data dilakukan dalam tiga tahapan, yang lakukan sejak pengumpulan data dimulai yaitu: Reduksi data adalah proses pemilihan dan penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif yang dibantu dengan metrik dan table. Penarikan kasusimpulan adalah mencari makna, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Dilakukan secara cermat dan sistematis dengan cara verifikasi, memeriksa kembali catatan lapangan, sehingga data-data yang ada teruji validitasnya (Sugiyono, 2013).

Hasil Penelitian

Hasil penelitin Asnawi, dkk. (2013) tentang Pengembangan Coloring Economic Models, Satu Strategi Kemitraan antara Sektor Karet dan Kelapa Sawit sebagai Penggerak Ekonomi dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan di Provinsi Aceh, menyebutkan bahwa Aceh Timur memiliki lahan perkebunan sawit produktif seluas 16.573 Ha² dengan produksi 136.651 ton (perkebunan besar) dan Perkebunan rakyat dapat menghasilkan 30.491 ton pertahunnya. Luas areal sawit rakyat Aceh Timur tahun 2013 yaitu 19.853,50 Ha yang tersebar di 24 Kecamatan (BPS Aceh Timur, 2014).

Luas areal kelapa sawit bantuan untuk mantan kombatan GAM dan korban konflik di Aceh Timur SEKITAR 3.726 Ha, yang tersebar pada 23 kecamatan dengan keterlibatan petani sebanyak 3.408 orang (Dokumen Laporan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur, 2014). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 6.2 berikut. Dalam gambar peta yang disajikan terlihat bahwa hanya satu kecamatan saja yang tidak mendapat bantuan untuk pengembangan kelapa sawit yaitu kecamatan Simpang Jernih. Sebanyak empat kecamatan yaitu Indra Makmur, Rantau Peureulak, Peureulak dan Peureulak barat mendapat bantuan lebih dari 400 Ha. Yang paling kecil perolehan bantuan kelapa sawit dari Pemerintah Aceh yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yaitu Kecamatan Serbajadi,

Darul Falah, Banda Alam, Idi Rayeuk dan Darul Ihsan yaitu kurang dari 50 Ha. Jika dibandingkan dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Aceh Timur, jumlah bantuan kelapa sawit yang diberikan untuk mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik adalah mencapai 18,8 %. Besarnya bantuan yang diberikan adalah rata-rata seluas 1,1 Ha



Gambar: Peta Areal Sawit Bantuan untuk Mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik setiap Kecamatan di Aceh Timur

Menurut Nasruddin Abubakar, mantan wakil bupati (17 Mei 2014) Pemerintah Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2009 telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan mantan kombatan GAM dan korban konflik, melalui bantuan Kementerian BUMN. Luas areal yang direncanakan sebesar 15.000 Ha atau senilai 2 milyar. Namun program tersebut tidak dapat direalisasikan, karena ketidaksiapan Pemerintah Aceh Timur dalam memenuhi persyaratan administrasi ketika itu (Aceh Timur belum memiliki data yang akurat tentang kelompok penerima manfaat, sementara lahannya sudah ada).

Sebenarnya pada awalnya Koperasi Bina Nanggroe sudah menyediakan data lahan dan kelompok yang dibutuhkan yang sesuai dengan rencana kegiatan dan relative valid, namun oleh Muslem Hasbullah (Bupati Aceh Timur ketika itu) menolak Koperasi Bina Nanggroe dan mengusulkan koperasi yang lain. Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Sehingga sampai akhir jabatan pemerintahan Muslem dan Nasruddin, program bantuan yang direncanakan tersebut tidak jelas realisasinya. Padahal jika program pemberdayaan tersebut berjalan, maka sangat positif dampaknya bagi proses pemberdayaan masyarakat di Aceh Timur kedepan.

Namun demikian, menurut Nasruddin pemberdayaan melalui pemberian lahan dan bantuan penanaman sawit sangat bagus, akan tetapi program tersebut juga berdampak pada kemunduran tingkat kreativitas penerima untuk mengembangkan diri mereka karena terbiasa dengan hanya menerima bantuan yang dapat meningkatkan ketergantungan masyarakat kepada bantuan. Perilaku masyarakat yang demikian itu, bantuan yang diberikan hanya berdampak positif dalam jangka pendek. Dimana masyarakat penerima bantuan akan cenderung menjual apa yang mereka dapatkan. Seharusnya kebijakan pemberian bantuan untuk pemberdayaan harus dilakukan dengan pemberian kapasitas penerima melalui pemberian pendidikan dan pelatihan serta membangun kapasitas masyarakat supaya mereka menganggap bahwa program bantuan dapat bermanfaat dalam jangka panjang.

Sementara menurut Pak Ibrahim, Ka TU Dinas Perkebunan Aceh TIMUR (17 Mei 2014), Aceh Timur mempunyai lahan sekitar 115 Hektare yang dimanfaatkan untuk penanaman sawit oleh masyarakat. Lahan tersebut dikelola dengan sumber dana reguler untuk pembukaan lahan dan penanaman sawit. Akan tetapi terdapat satu kendala, yaitu masalah koordinasi antara Dinas Perkebunan Aceh Timur dengan Dinas Perkebunan Provinsi Aceh dalam pelaksanaannya.

“Pemerintah Provinsi sudah mendesain programnya sedemikian rupa, tetapi tiba-tiba disuruh buat Rencana Usulan Kebutuhan Kelompok (RUKK) kepada Dinas Perkebunan Aceh Timur. Kami tidak mau buat, karena untuk apa kita buat rencana usulan, semua barang sudah ada, lokasinya sudah jelas. Biasanya pihak dinas (Provinsi) menyuruh dinas kabupaten untuk membuat usulan, tetapi formalitas saja dari kami. Akibatnya kami tidak mau, kami suruh sosialisasikan sendiri ke masyarakat. Makanya kenyataan ini agak rancu, kabupaten yang punya lahan, provinsi buat program sendiri tanpa menganulir program ke kabupaten”.

Beliau melanjutkan sebagaimana yang terjadi pada tahun 2012, ada lahan di Julok dan Pante Bidari, luas areal 100 hektare, dan Pengelolaanya (diketua oleh si Baret). Masyarakat korban konflik dan mantan kombatan mengusulkan bantuan langsung ke dinas provinsi, namun mereka tidak menyebutkan secara terperinci identitas mereka apakah mereka korban konflik atau kombatan. Akan tetapi kedua kriteria tersebut ada sama mereka (pengurus koperasi). Mereka bukan hanya mengusulkan bantuan ke dinas, tetapi ada juga di antara mereka yang mengusulkan bantuan ke Dewan Provinsi (anggota DPRA) untuk

mendapatkan dana ‘aspirasi’ dewan. Dalam perjalanannya, sebahagian mereka ada yang mendapatkan bantuan (dari aspirasi dewan), tetapi juga tidak diberitahukan ke dinas kabupaten, mereka mengurus sendiri langsung keBanda Aceh, tidak melibatkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur, padahal areal lahan yang diusulkan berada di dalam kawasan Aceh Timur. Oleh sebab itu, dapat kami katakan bahwa areal lahan sawit untuk kombatan di Aceh Timur sudah ada.

Selain itu, pada tahun 2010 Irwandi (Gubernur) juga memberikan bantuan pembukaan lahan dan penanaman sawit seluas 40 Hektare, yang berlokasi di Buket Makmur Julok Aceh Timur. Dikordinir oleh si Mamplam. Program ini didampingi oleh pak Basarudin³ dari Dinas Perkebunan Aceh Timur. Berdasarkan kenyataan ini, menjelaskan bahwa di Aceh Timur telah diberikan bantuan untuk kelompok miskin, yang terdiri dari korban konflik dan mantan kombatan GAM. Mereka umumnya ketika memohon bantuan mengatasnamakan Komite Peralihan Aceh (KPA) / Parti Aceh (PA)⁴, sehingga pihak dinas harus berusaha membantu kelompok mereka. Bahkan sampai hari ini yang paling sering datang ke kantor untuk minta bantuan/proyek adalah orang KPA/PA, semntera masyarakat biasa jarang sekali datang ke kantor.

Namun demikian, jumlah areal lahan sawit yang disebutkan di atas tidak diperuntukkan secara khusus kepada mantan kombatan GAM dan masyarakat korban konflik, tidak terlihat secara jelas terpisahkan dari areal sawit masyarakat lainnya, karena semua masyarakat menganggap dirinya korban konflik. Seperti diutarakan oleh masyarakat dalam FGD (28 September 2014):

“Jangan ditanya berapa jumlah korban konflik yang menerima bantuan dan anggota koperasi. Semua masyarakat Aceh, khususnya kami di Aceh Timur adalah korban konflik, termasuk guru dan polisi. Ketika konflik berlangsung di Aceh jika ada masyarakat yang tidak merasa dipukul oleh aparat keamanan dianggap bukan sebagai orang Aceh, bahkan merasa malu karena dianggap berarti tidak melawan pemerintah Indonesia yang dinilai seperti penjajah ketika itu”.

Supaya program penanaman sawit yang dilaksanakan berjalan lebih efektif, Pemerintah Aceh Timur telah membangun satu sistem yang dinilai baik. Salah satunya adalah melalui Program Peumakmu Gampong. Program ini direncanakan akan berlangsung mulai tahun 2014. Mekanisme pelaksanaannya adalah menyeleksi petani yang layak untuk dibantu. Namun sebelum bantuan diberikan, kelompok sasaran terlebih dahulu diberikan pelatihan dan penyuluhan pertanian, selanjutnya dilakukan pendampingan secara kontinue. Program ini akan dilaksanakan di Kecamatan Peunaron, Indra Makmu, Birem Bayeun, Ranto Perlak dan Ranto seulamat.

Walau bagaimanapun, pada saat ini terdapat lima permasalahan utama yang dialami oleh para petani sawit di Aceh Timur, yaitu: pertama, hama gajah dan hama wereng. Kedua, jalan menuju ke lokasi sawit sangat sukar untuk diakses. Ketiga, ketersediaan pupuk yang tidak memadai, kadang-kala pupuk ada tapi harganya mahal, kadang-kadang pesediaannya tidak ada. Keempat, kualitas produksi buah sawit menurun akibat dari serangan hama dan kurang pupuk. Kelima, Harga jual sawit tidak terkontrol, kadang- kadang harganya merosot sangat murah mencapai Rp 500 (wawancara dengan mukhlis, petani sawit nurussalam).

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui komoditi sawit di Kabupaten Aceh Timur yang difokuskan kepada mantan kombatan GAM dan masyarakat korban konflik telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh dan melibatkan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (Dinas Kehutanan dan Perkebunan) dalam menentukan lokasi dan penerima manfaat. Pelibatan Pemerintah Kabupaten

Aceh Timurnya bersifat formalitas saja. Masyarakat dapat mengusulkan langsung bantuannya kepada Pemerintah Aceh tanpa melalui Pemerintah Aceh Timur. Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Aceh Timur fungsinya hanya sebagai pendistribusi dan pengawas program bantuan dari Pemerintah Aceh.

Hasil pemetaan, areal sawit bantuan di Aceh Timur melingkupi 23 kecamatan. Areal Perkebunan Sawit di Aceh Timur dapat dibagikan dalam dua kategori berdasarkan penggunaan lahan, yaitu areal perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan dan perkebunan rakyat yang dikelola oleh masyarakat. Bantuan yang diberikan untuk mantan kombatan GAM dan masyarakat korban konflik lokasi arealnya tidak dipisahkan, bahkan bantuan yang diusulkan melalui kelompok, anggotanya terdiri dari tiga komponen masyarakat tersebut, yaitu masyarakat biasa, mantan kombatan GAM dan masyarakat korban konflik. Dalam terminologi masyarakat Aceh semua masyarakat menganggap dirinya sebagai korban konflik.

Program bantuan sawit yang dijalankan di Aceh Timur telah berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat khususnya peningkatan pendapatan petani penerima bantuan maupun masyarakat sekitarnya. Penanaman sawit juga telah membuka lapangan kerja kepada masyarakat sekitar. Peningkatan pendapatan juga berdampak terhadap peningkatan keamanan lingkungan karena tingkat kriminalitas yang disebabkan oleh kemiskinan menurun. Pada akhirnya pemberdayaan ekonomi melalui komoditi sawit dapat menghilangkan sikap separatisme di masyarakat Aceh.

Bibliografi:

- Adams, Friedel Hutz, 2011, Minyak Kelapa Sawit, Perkembangan dan Resiko dari Ledakan Pasar Minyak kelapa sawit, <http://www.brot-fuer-die-welt.de/> Akses 23 Oktober 2014.
- Basyid, Abdul. tt. Pemberdayaan masyarakat pertanian melalui penguatan modal usaha kelompok petani. [http://www. Balitnak.litbang. pertanian.go.id](http://www.Balitnak.litbang.pertanian.go.id)
- Burhan. 2011. Pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan. Departemen Agribisnis FEM IPB.
- BPS Aceh Timur, 2010. Aceh Timur dalam Angka, [http://acehtimurkab. bps.go.id](http://acehtimurkab.bps.go.id).
- BPS Aceh Timur, 2014. Aceh Timur Dalam Angka 2014. Aceh Timur: Badan Pusat Statistik
- Dalle Daniel Sulekale, 2008. Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah, <http://www.ekonomirakyat.org>
- Dillon, Hs, 1993, Kemiskinan di Negara Berkembang: Masalah Konseptual dan Global, Prisma No. 3-LP3ES Jakarta.
- Erwin, dkk (2009) Prospek dan tantangan perkebunan kelapa sawit sebagai sumber bahan bakar nabati dan mitigasi dampak perubahan iklim. Semiloka.

- Effendi, Machroes, 1996, Dampak Sosial ekonomi dan Budaya Perkebunan Kelapa Sawit, Studi Kasus PIR V Ngabang PT Perkebunan Nusantara KIII di Kalimantan Barat. Jakarta, Universitas Indonesia.
- Green Peace, 2010, Teratngkap Basah, Bagaimana eksploitasi minyak Kelapa Sawit Oleh Nestle Memberi dampak Kerusakan Bagi Hutan Tropis Iklim dan Orang Hutan. www.greenpeace.org.
- Indiahono, Dwianto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Jogjakarta: Gavamedia.
- Nugroho, Heru. 2001. Menemukan Ide-Ide Kritis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soeharto, E. 2008. Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi dan Strategi. <http://www.policy.hu./soeharto/modul>.
- Suharto, E. 2011. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta.
- Selo Sumarjan, 1977. Kemiskinan: Suatu Pandangan Sosiologi, Jurnal Sosiologi Indonesia No. 2-1977, Ikatan sosiologi Indonesia.
- Winarno. 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Jogjakarta: Media Presindo.